
Birokrasi dan Korupsi dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah pada Tahun 2013-2015

Bureaucracy and Corruption in the Use of School Operational Assistance Funds (BOS) in the Regional Government of Donggala Regency, Central Sulawesi in 2013-2015

Elvira

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia
(*Email Korespondensi: elvira898@gmail.com)

Abstrak

Dalam era otonomi pendidikan, daerah perlu membangun pendidikan secara baik agar sektor ini mampu dijadikan penggerak bagi kemajuan daerah. Pergeseran struktur kewenangan sistem administrasi pendidikan ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sistem pengelolaan pendidikan. Ekspektasi pelaksanaan Dana Bos Daerah (BOS) daerah pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah terwujudnya demokrasi pendidikan, artinya pendidikan dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Selain alasan demokrasi, kebijakan pendidikan dalam Dana Bos Daerah (BOS) pendidikan secara konkret dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal dibidang pendidikan. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan sampai pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Korupsi, Penggunaan, Dana Bantuan Operasional Sekolah

Abstract

In the era of educational autonomy, regions need to develop education properly so that this sector can be used as a driving force for regional progress. This shift in the authority structure of the education administration system is the right momentum to reform the education management system. The expectation for the implementation of the Regional Bos Fund (BOS) for education by the district/city government is the realization of education democracy, meaning that education is carried out from, by, and for the people. In addition to democratic reasons, the education policy in the Regional Bos Fund (BOS) education is concretely intended to solve problems faced by local communities in the field of education. The management of BOS funds must be carried out systematically from planning to monitoring to achieve the goals that have been set.

Keywords: Corruption, Use, School Operational Assistance Funds

PENDAHULUAN

Negara (State) adalah institusi yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mengatur masyarakat dimana didalamnya juga terdiri dari bagian - bagian kecil yang menjadi objek yang di perintahkan (1). Bagian kecil itu di anggap telah menyerahkan kekuasaannya secara sukarela maupun karena hukum untuk mengambil keputusan.

Jika persoalan itu manusia mengakumulasi menumpuk terus menerus dan menjadi persoalan masyarakat dan kemudian jika mengkristal menjadi persoalan Negara atau pemerintah mulailah manusia menyadari ketertiban birokrasi dan administrasi Negara.

Manusia hidup ini selalu membutuhkan organisasi atau birokrasi pemerintah (2). Begitu manusia lahir dia membubuhkan catatan keorganisasi pemerintah tentang akte kelahiran, masuk sekolah mendaftarkan keorganisasi pemerintah dibidang pendidikan, mau nikah butuh pekerjaan urusan agama, meninggal dunia pun masih membutuhkan upaya kantor pemerintah. Betapa hebat dan menyeluruhnya urusan organisasi pemerintah itu mengintervensi kehidupan dan kematian seseorang.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa baik di negara - negara berkembang maupun negara - negara kapitalis pun, peranan birokrasi dan elit - elit didalamnya masih memainkan peranan kunci dalam pembangunan secara umum dan dalam pembangunan politik. Dan dengan kerangka seperti itu, maka dapat mengarah kepada sistem politik yang demokratis. Birokrat sebenarnya dihadapkan pada kemungkinan keterkaitan kesalahan / penyimpangan pengelolaan administrasi negara dengan konsekuensi munculnya resiko tuduhan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya begitu rawan ada diancam dalam UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 (3). Korupsi di Indonesia benar-benar sangat sistemik, bahkan korupsi yang terjadi sudah berubah menjadi vampir state karena hampir semua infra dan supra struktur politik dan sistem ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi (4).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi dan wawancara. Sedangkan analisis data dilaksanakan melalui tiga jalur kegiatan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. tiga jalur kegiatan ini adalah (1) klasifikasi data (2) agregasi data (3) menyusun pernyataan pokok (5). Dari tiga alur ini dapat membuat data menjadi bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Korupsi Dalam Lingkungan Birokrasi

Korupsi sudah menjadi gaya hidup di Indonesia begitu juga khususnya yang sedang terjadi di SATAP 9 Sojol di Daerah Kabupaten Donggala. Banyak orang yang begitu menikmati tindakan korupsi ini. Sedemikian banyak manusia yang melakukan korupsi dari pusat sampai daerah. Koruptor – koruptor ini terutama adalah pihak – pihak yang menduduki jabatan strategis dalam berbagai institusi Negara dan administrasi, dari lapisan bawah sampai atas. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus / politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (6).

Pemicu Korupsi di SATAP 9 Sojol Di Kabupaten Donggala

Pada Daerah Kabupaten Donggala Pemicu korupsi lainnya ialah bertambahnya jumlah pegawai negeri secara cepat dengan akibat gaji mereka sangat kurang. Hal ini mengakibatkan perlunya pendapatan tambahan serta bertambah luasnya kekuasaan dan kesempatan birokrasi dibarengi dengan lemahnya pengawasan dari atas dan pengaruh partai – partai politik.

Selain itu korupsi yang begitu erat pada lingkungan birokrasi sekolah SATAP 9 Sosol di Daerah Kabupaten Donggala di karenakan adanya sistem kekeluargaan, kekerabatan dan dinasti / oligarky pada jabatan dan kekuasaan.

Faktor Pendorong Terjadinya Korupsi

Faktor – faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur - unsur sebagai berikut : 1) Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim – rezim yang bukan demokratik. 2) Gaji yang masih rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang - undangan, administrasi yang lamban dan sebagainya (7).

Penyebab Korupsi pada individu juga disebabkan antara lain : 1) Sikap mental para pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang haram, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. 2) Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. 3) Kampanye - kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. 4) Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. 5) Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama". 6) Lemahnya ketertiban hukum. 7) Lemahnya profesi hukum. 8) Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

Dampak Korupsi

Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus (8).

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat di Daerah Kabupaten Donggala. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat.

Solusi Pencegahan Korupsi Dalam Lingkungan Birokrasi

Solusi yang dapat digunakan untuk mencegah korupsi antara lain : 1) Cara Sistemik – Struktural. 2) Cara Abolisionisti. 3) Cara Moralistik.

Upaya-Upaya Dalam Mengatasi Tindakan Korupsi Pada Lingkungan Birokrasi

Ada beberapa upaya penggulungan korupsi yang ditawarkan para ahli yang masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. Langkah – langkah untuk menanggulangi korupsi sebagai berikut : 1) Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu. 2) Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat. 3) Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan (9).

Cara Menanggulangi Korupsi Pada Lingkungan Birokrasi

Ada empat strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi intensitas korupsi di daerah, yaitu : 1) Memutus serta merampingkan (streamlining) jaringan proses birokrasi yang bernuansa primordial di kalangan penentu kebijakan, baik itu yang berada di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, sehingga tata kerja dan penempatan pejabat pada jabatan atau posisi - posisi tertentu benar - benar dapat dilaksanakan secara akuntabel dan profesional serta dilaksanakan dengan pertimbangan profesionalisme dan integritas moral yang tinggi; 2) Menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara tegas, adil dan konsekuen tanpa ada diskriminasi bagi para pelaku korupsi, dalam arti bahwa prinsip - prinsip negara hukum benar – benar harus diterapkan secara tegas dan konsekuen, terutama prinsip equality before the law; 3) Para penentu kebijakan, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang penegakan hukum harus memiliki kesamaan visi, profesionalisme, komitmen, tanggungjawab dan

integritas moral yang tinggi dalam menyelesaikan kasus - kasus korupsi; dan 4) Memperjelas serta memperkuat mekanisme perlindungan saksi (10).

Konsep Bantuan Operasional Sekolah Di Daerah Kabupaten Donggala

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personal hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas) (11). Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata - rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah (12).

Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Di Daerah Kabupaten Donggala

Salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu adalah program BOS. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Dalam Rangka Penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan.

Program – program tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Penggunaan Dana Bos Di Daerah Kabupaten Donggala

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah (13).

Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

Permasalahan Pengelolaan Dana Bos Di Daerah Kabupaten Donggala Dan Solusinya

Harus diakui, masalah utama dana BOS terletak pada lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang tidak transparan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelas terlihat bahwa di dalam implementasinya, fungsi pengawasan sangat kurang. Tidak ada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses implementasi anggaran di semua tingkat penyelenggara, Kemendiknas, dinas pendidikan, maupun sekolah. Pada tingkat pusat, proses penganggaran pun turut dimonopoli oleh Kemendiknas, akibatnya kepentingan Kemendiknaslah yang lebih terpenuhi, bukan mendahulukan yang perlu.

Solusi Permasalahan dana BOS di Daerah Kabupaten Donggala

Ada beberapa langkah yang kemungkinan bisa diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini diantaranya : 1) Peninjauan Kembali Kebijakan. 2) Dana Berkeadilan. 3) Pengawasan yang Efektif dan Efisien. 4) Pendampingan Dari Ahli Yang Kompeten.

Tugas dan tanggung jawab Tim BOS Kabupaten / Kota Donggala meliputi

Tugas dan tanggung jawab Tim BOS Kabupaten / Kota Donggala meliputi: 1) melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2) melakukan monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara online; 3) memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di

sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan akurasinya. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik; 4) memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat / kriteria agar memperoleh alokasi BOS minimal; 5) Kepala dinas pendidikan kabupaten / kota sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten / Kota menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar; 6) Memberikan sosialisasi / pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa birokrasi di daerah kabupaten donggala merupakan sistem kekuasaan kepemimpinan dimana seorang pemimpin daerah bisa mengendalikan bahkan membuat aturan dalam pelaksanaan birokrasi atas kebijakan yang dibuat. Kedua, Birokrasi dan kekuasaan di daerah Kabupaten Donggala tidak lepas dari cara kepemimpinan seorang bupati dalam mengambil sikap sesuai dengan kebijakan yang diterapkannya pada masyarakat, namun aturan dalam kebijakan mengalami keberpihakan pada warga masyarakat masyarakat. Ketiga, mengenai mekanisme penyelenggaraan dana BOS khususnya di wilayah kecamatan Sojol di daerah kabupaten Donggala bahwa tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah masih didominasi adanya kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang serta dilakukannya rekayasa manipulasi data pada laporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak kepek dan bendahara. Keempat, Penyebab terjadinya penyimpangan tersebut di karenakan kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat serta tidak adanya transparansi jumlah dana anggaran dan fungsi dana BOS, begitu pula transparansi penggunaan dana BOS baik kepada orang tua murid maupun tokoh masyarakat lainnya. Kelima, secara personal kurangnya pengetahuan norma, etika pada individu serta kurang efektifnya pengawasan pemerintah terhadap oknum guru di sekolah dalam penegakan kegunaan dan fungsi dana BOS.

SARAN

Rekomendasi saran kepada birokrasi perlu melakukan perbaikan pada SDMnya karena masih banyak pejabat dan anggota yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Tetapi disini yang perlu memperbaiki SDMnya bukan hanya dari pemerintah saja, namun juga diperlukan kesadaran pribadi dari para anggota akan kewajibannya melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Johan TSB. Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia. Deepublish; 2018.
2. Setiawan I. Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah. irfan setiawan; 2014.
3. Prabowo IWE. Penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. UNS (Sebelas Maret University); 2014.
4. GUSTI N. TIGA FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERBUATAN KORUPSI DI INDONESIA TELAAH KASUS YANG DITANGANI KEJAKSAAN DAN PENGADILAN NEGERI PADANG, SUMATERA BARAT. UNIVERSITAS ANDALAS; 2013.
5. Kamal B. Konflik Kepentingan Perebutan Pesisir Kota Makassar dalam Pembangunan Center Point of Indonesia. Polit J Magister Ilmu Polit Univ Hasanuddin. 2017;3(2):83–93.
6. Erlina T. NIKAH SIRI DAN KORUPSI (NIKAH SIRI AND CORRUPTION). 2017;
7. Mursidi A, Sulistri E. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI. Penerbit Lakeisha; 2020.
8. Wibowo FA. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Universitas Muhammadiyah Metro; 2019.
9. Hasbullah H. Perintah Atasan atau Jabatan (Ambtelijk Bevel) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi. J Muara Ilmu Sos Humaniora, dan Seni. 2017;1(1):84–94.
10. Ismansyah I, Sulisty PA. Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta

- Strategi Penanggulangannya. *J Demokr.* 2010;9(1).
11. Rohman F. Studi tentang manajemen pembiayaan Pendidikan melalui program bantuan Operasional sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. UIN Walisongo; 2009.
 12. Januwarso A. Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN-Jurnal Ilmu Adm Negara.* 2017;1(1):1–9.
 13. Okvita A. Pengelolaan Dana Bos Sekolah (BOS). 2019;